

Bulan :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

|               |              |           |                 |              |
|---------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|
| Suara Merdeka | Jateng Pos   | Jawa Pos  | Media Indonesia | Wawasan      |
| Tribun Jateng | Metro Jateng | Republika | Kompas          | Media Online |

Wilayah Berita : Kabupaten Sragen

Halaman 6 dan 15

## Disoal, 23 Mobil Dewan Belum Dikandangan

**SRAGEN** - Penggunaan fasilitas seperti kendaraan operasional dewan disoal kalangan masyarakat. Pasalnya, para wakil rakyat ternyata masih menggunakan fasilitas dewan, meski gaji dan tunjangan mereka naik signifikan hingga 300 persen. Menyusul, banyak mobil dewan yang belum sekitar 23 unit belum dikandangan.

Tokoh masyarakat Sragen Syaiful Hidayat mengatakan, mestinya fasilitas mobil operasional segera dikembalikan seiring kenaikan gaji dan tunjangan.

"Fasilitas dewan seperti kendaraan operasional masih banyak yang dipakai daripada yang dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan pasti mereka mengundang wartawan, tapi kenyataannya diam saja. Padahal kenaikan gaji maupun tunjangan mencapai 300 persen" tandas mantan anggota dewan empat periode ini, Senin (18/9).

Mantan legislator DPRD Sragen itu menjelaskan, seharusnya para wakil rakyat tak lagi membebani anggaran daerah dengan pos-pos anggaran seperti fasilitas kendaraan operasional.

"Bila dalam aturan dikembalikan ya harus dikembalikan, jangan bikin istilah aneh-aneh seperti pinjam pakai. Karena saya sejak dulu yang namanya mobil operasional ya namanya pinjam pakai," sambung dia.

Saiful mempertanyakan sumber anggaran bahan bakar dan pemeliharaan rutin kendaraan operasional yang belum dikembalikan. Sebab selama ini ada pos anggaran tersebut.

"Persoalannya ketika ada istilah pinjam pakai, anggaran pemeliharaan rutinnnya bagaimana, BBM

bagaimana. Sebab selama ini tiap kendaraan disiapkan Setwan," imbuh dia.

Saiful mengingatkan para wakil rakyat agar tidak gegabah. Sebab bila terjadi praktik penyimpangan tentu akan menjadi temuan saat tahap pemeriksaan oleh tim BPK.

"Dengan aturan yang baru itu semua sudah diubah. Kalangan dewan jangan main-main. Karena bila dilakukan pemeriksaan BPK bisa saja kena, siap-siap aja nanti," ujar dia.

Sorotan serupa dari Ketua Forum Masyarakat Sragen (For-

mas), Andang Basuki. Menurut dia kenaikan gaji dan tunjangan legislator mesti diikuti peningkatan kinerja.

Andang menyoroti sempat diundurnya Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Rancangan APBD Perubahan 2017 akhir Agustus 2017 lantaran tak kuorum.

Saat itu hanya 19 legislator yang hadir dari total 45 legislator. Setelah menunggu lama, tapi tak juga mencapai kuorum, akhirnya rapat diputuskan diundur.

"Ini menjadi preseden buruk.

Saya heran, saat membahas Perda Kenaikan Gaji dan Tunjangan tak ada sebulan rampung. Tapi saat membahas agenda lain lambat," kata dia.

Terpisah, Ketua DPRD Sragen, Bambang Samekto, saat dimintai tanggapan tidak menampik masih digunakannya kendaraan operasional DPRD.

Menurut dia hal itu lantaran tunjangan operasional belum cair kendati sudah dianggarkan. "Tapi kalau saya tak harus mengembalikannya, karena tak dapat tunjangan itu," kata dia. (ars)